

PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MAN 1 PALEMBANG

Lilys Febriana

Mahasiswa Prodi PAI UIN Raden Fatah Palembang

Muhammad Isnaini, A. Syarifuddin. Dosen UIN Raden Fatah Palembang

Email: *lilysfebriana29@gmail.com*

ABSTRAK

Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam perjalanan mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa data-data yang tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati sehingga dalam hal ini penulis berupaya mengadakan penelitian yang bersifat menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Selain itu keabsahan datanya di cek menggunakan teknik triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan member check.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang sangatlah baik, itu dapat dilihat dari segi peningkatan sarana prasaranan di sekolah. Komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang tak luput dari beberapa perannya tersebut, yang pertama pertimbangan (*advisory agency*), yang kedua sebagai pendukung (*supporting agency*), yang ketiga sebagai pengotrol (*controlling agency*), dan yang keempat sebagai mediator (*executive*). Kesimpulannya bahwa komite sekolah sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang karena komite sekolah memiliki beberapa peranan yang harus dijalankan untuk sekolah itu. Memberikan pertimbangan (*advisory agency*), dalam setiap perencanaan dan program yang disusun oleh sekolah, komite sekolah. Mendukung (*supporting agency*) penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Melakukan Kontrol (*controlling agency*) terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, dan Menjadi Mediator atau penghubung antara aspirasi orang tua masyarakat terhadap pihak sekolah dan turut serta memasyarakatkan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang terkait dan berwenang di tingkat daerah.

Keywords: *Komite Sekolah Dan Mutu Pendidikan*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu proses pelatihan dan pengajaran, terutama di peruntukkan kepada anak-anak dan remaja, baik di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus, dengan tujuan memberikan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan-keterampilan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.¹

Pendidikan juga adalah proses pemartabatan manusia menuju puncak optimasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimilikinya. Pendidikan adalah proses membimbing, melatih, dan memandu manusia terhindar atau keluar dari kebodohan dan pembodohan. Pendidikan adalah metamorfosis perilaku menuju kedewasaan sejati. Pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai proses elevasi yang dilakukan secara nondiskriminasi, dinamis, dan intensif.²

Menurut John Dewey, pendidikan adalah sebuah kebutuhan hidup dan fungsi sosial, yang bertumpuk pada masing-masing individu juga golongan/masyarakat, dengan kemungkinan mengalami kemajuan yang bias diukur dengan kriteria-kriteria tertentu, secara demokratis bisa dinilai dari kualitas masyarakat yang ada. 3

Menurut Muhammad Athiyah Al-Abrasyi memberikan pengertian bahwa pendidikan islam (Al-Tarbiyah Al-Islamiah) mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan berbahagia, mencitai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tuturkatanya baik dengan lisan dan tulisan⁴

Dengan memperhatikan beberapa defrinishi di Atas maka berarti pendidikan islam adalah suatu proses edukatif yang mengarah kepada pembentukan akhlak atau kepribadian. Pendidikan agama islam di Indonesia mendapatkan tempat yang layak serta perhatian yang serius dari masyarakat dan pemerintah mulai sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Dan pendidikan agama merupakan mata pelajaran yang paling penting atau pokok di sekolah. Ini menunjukkan pentingnya kedudukan pendidikan agama islam di sekolah dan di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yakin manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri dan bertanggung jawab kemasyarakat dan kebangsaan. 5

Dari tujuan pendidikan nasional diatas, ditegaskan bahwa salah satu ciri manusia Indinesia yang menjadi tujuan pendidikan nasional ialah manusia yang beriman dan bertakwa. Agar beriman dan bertakwa ini dapat terwujud, mutlak diperlakukan adanya pendidikan keimanan dan ketakwaan. Dan itulah pendidikan agama.

Tujuan pendidikan nasional tersebut, menempati hirerarki tertinggi jika dilihat dari taksonomi tujuan pendidikan. Ibarat sebuah pohon dimana tujuan pendidikan

¹U.H. Saidah, *pengantar pendidikan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2016), hlm 1

²Sudarwan Danim, *pengantar pendidikan*, (Bandung: Alfabeta,2010),hlm 2

³*Ibid*, hlm 7

⁴Rahmayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 1995), hlm.1-4

⁵Undang-undang dan peraturan pemerintah RI, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, (jakarta: dirjen pendidikan islam depag RI, 2006), hlm. 8-9

nasional sebagai batangnya, sedangkan tujuan kelembagaan (institusional) dan tujuan pengajaran (kurikuler) adalah sebagai cabang dan rantingnya.

Pada dasarnya pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup dengan baik. Sebuah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan islam di Indonesia tidak pernah berhenti dan selesai. Berbagai konsep dan wawasan baru itu diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia agar mampu bersaing secara global. Dengan demikian persoalan peningkatan mutu pendidikan sangat perlu dikaji dan diperjuangkan.

Untuk merealisasikan perjuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan maka perlu adanya pembenahan dari segi sumber daya manusianya, lembaga penyelenggara pendidikannya seperti MI, MTS, MA dan perguruan tinggi dan semuanya itu perlu didukung oleh sumber daya pendidikan yang layak. Sumber daya pendidikan itu antara lain: tenaga ahli atau guru, manajemen, kurikulum, sarana dan prasarana serta dana yang diadakan dan di dayagunakan oleh pemerintahan, masyarakat, keluarga, peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam membentuk kerjasama.⁶

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memperdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi kegiatan masyarakat dan pemerintahan.⁷ Dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), peran peserta dan dukungan masyarakat, baik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan. Untuk menampung peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan, maka dibentuklah komite sekolah.

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami (*natural setting*). Selain itu, data yang terkumpul lebih bersifat kualitatif.⁸

Teknik analisis data dapat dilakukan setelah data-data telah terkumpul melalui teknik analisis data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Saya sebagai penulis menggunakan teknik analisis

⁶Sukirno, *pedoman kerja komite sekolah* (yogyakarta: Pustaka widyamata,2006), hlm. 3

⁷E.Mulyasa, *manajemen berbasis sekolah*, (Bandung PT. Remaja Rosada Karya, 2006) hlm. 11

⁸Sugiyono, *metodelogi penelitian kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2016), hlm. 14

data deskriptif kualitatif yaitu dengan beberapa langkah diantaranya penyajian data, menganalisa data dan menyimpulkan data.

Dimana teknik analisis data yang digunakan dalam peneliti ini adalah model Miles and Huberman dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁹

Pertama, reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan di verifikasi.¹⁰ Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pada bagian ini, peneliti memilih dan memilih data hasil wawancara dengan beberapa guru di MAN 1 Palembang sehingga peneliti bisa mendapatkan hasil kesimpulan akhir. *Kedua*, Data Display (Penyajian Data) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi dimasa lampau.¹¹ Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagaian, hubungan antara katagori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Pada bagian ini, peneliti menyajikan data dari hasil reduksi data dengan bentuk uraian singkat. Uraian singkat peneliti dapatkan setelah melakukan wawancara dengan beberapa guru di MAN 1 Palembang. *Ketiga*, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan (*verifikasih*). Penarikan kesimpulan (*verifikasih*), yaitu makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji keberannya, kekokohnya, dan kecocokannya yaitu berupa validasi.

HASIL PENELITIAN

Kepmendiknas dengan tegas dinyatakan bahwa komite sekolah adalah badan usaha mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan. Dalam kepmendiknas nomur 044/U/2002 tersebut ditegaskan bahwa dewan pendidikan berkedudukan do kabupaten atau kota, sedangkan komite sekolah nerkedudukan disatuan pendidikan, baik pendidikan sekolah ataupun madrasah maupun pendidikan luas sekolah.¹²

Komite sekolah juga mengemban empat peran sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan disatuan pendidikan.
2. Pemberi dukungan (*supporting agency*) baik berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.

⁹Sugiyono, *Op. Cit*, hlm 246

¹⁰*Ibid.*, hlm. 408

¹¹ *Ibid.*, hlm. 40

¹²Sri Rerani Pantjastuti, *komite sekolah*, (Yogyakarta:Hikayat Publishing, 2008), hlm 81-83

3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatukan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintahan (*executive*) dengan masyarakat disatukan pendidikan.¹³

Agar komite sekolah dapat berperan dengan baik maka dalam pembentukan pengurus pun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan mekanisme yang benar, serta dapat dikelola oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan anggota komite dilakukan secara akuntabel bahwa anggota komite bertanggung jawab dalam kinerjanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ahmad Alamsyah selaku waka humas MAN 1 Palembang, beliau menyatakan bahwa: “Mekanisme pembentukan komite sekolah di MAN 1 Palembang ini terlebih dahulu dirapatkan oleh kepala sekolah guru serta staf sekolah, dan di tindak lanjutin dengan rapat selanjutnya memanggil beberapa orang di antaranya yaitu: tokoh masyarakat sekitar, wali murid-wali murid yang dianggap berpotensi, setelah mereka yang diundang datang, lalu kita mengadakan musyawarah, dan kemudian dilakukan pemilihan, tetapi didalam kepengurusan komite ini tidak ada satupun guru yang terlibat dalam kepengurusan komite di MAN 1 Palembang ini.”¹⁴ Hal senada yang diungkapkan oleh Ibu Nurbani selaku kepala TU di MAN 1 Palembang beliau mengatakan yaitu:

“Pemilihan anggota komite dan pengurus komite dilakukan secara musyawarah di MAN 1 Palembang pada waktu pemilihan sekolah mengundang wali murid. Agar pemilihan anggota komite dan kepengurusan komite ini bersifat transparan dan juga guru tidak ikut didalam kepengurusan komite sekolah ini, semua diserahkan kepada wali murid”¹⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilihan/pembentukan kepengurusan anggota komite sekolah bersifat musyawarah dan demokratis, sesuai dengan SK Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam tentang prinsip pembentukan komite sekolah, yaitu: transparansi, akuntabilitas dan demokratis, serta merupakan mitra satuan pendidikan.

Untuk mengetahui kapan komite sekolah dibentuk, peneliti melakukan wawancara langsung kepada Bapak Ahmad Alamsyah selaku waka humas di MAN 1 Palembang, yaitu: “Sebenarnya komite sekolah di MAN 1 Palembang sudah lama dibentuk tetapi sempat fukam, dan dihidupkan kembali pada tahun 2017, kalau tidak salah tanggal 15 Maret 2017.”¹⁶ Sedangkan menurut Bapak Syafi'i selaku waka sarana prasarana, evaluasi dan supervisi, yaitu: “Mengatakan bahwa komite sekolah dibentuk sudah lama dan sempat fukam, dan sekarang allhamdulillah sudah kembali berjalan dengan baik dan di ketuai oleh bapak Drs. Habson MM.”¹⁷

Secara formal, hampir semua sekolah telah memiliki perangkat komite sekolah sebagai wakil masyarakat dalam membantu program pendidikan di sekolah. Kehadiran komite sekolah telah menunjukkan sahamnya sebagai mitra sekolah,

¹³Kepmendiknas SK No. 004/U/2002, *tentang acuan pembentukan komite sekolah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 122

¹⁴Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 10 Oktober 2018.

¹⁵Nurbani, Kepala TU MAN 1 Palembang, *wawancara*, 11 oktober 2018.

¹⁶Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 10 Oktober 2018.

¹⁷Syafi'i, Waka Sarana Prasarana, evaluasi dan supervisi MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 11 Oktober 2018.

terutama bagi kepala sekolah dan guru dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan, baik program pembangunan fisik maupun non fisik. Sesuai dengan peranya dalam meningkatkan mutu pendidikan.

a. Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*)

Komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan terhadap sekolah memiliki arti, bahwa komite sekolah dipandang mitra kerja kepala sekolah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan sekolah.¹⁸ Melalui komite sekolah, orang tua dan masyarakat dapat ikut serta, merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh sekolah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah. Selama ini keberadaan komite sekolah sangat berarti sekali bagi setiap satuan pendidikan. Karena komite sekolah merupakan pembantu utama satuan dalam memakmurkan lembaga pendidikan selain masyarakat internal sekolah.

Segala macam program yang akan dilaksanakan sekolah sebaiknya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite sekolah. Sebab, segala macam kebijakan yang akan diterapkan ataupun yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat internal maupun eksternal sekolah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Ahmad Alamsyah, selaku waka humas di MAN 1 Palembang menyatakan bahwa:¹⁹

“Komite sekolah memberi pertimbangan khususnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, misalnya dalam hal pengadaan peralatan laboratorium, pengrehapan ruang kelas, rencana pembangunan ruang kelas, sebelum sekolah mengambil keputusan maka terjadilah diskusi antara kepala komite sekolah dan pihak sekolah.”

Hal senada diungkapkan oleh bapak Syafi'i selaku waka sarana prasarana, evaluasi, dan supervisi di MAN 1 Palembang, sebagai berikut: “Komite sekolah sebagai mitra kerja kepala sekolah dapat memeberikan pertimbanganya dalam setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah, misalnya sekolah akan mengajukan rehab sarana prasaranan dan gedung yang rusak, sekolah akan melakukan penambahan 3 lokal ruang kelas, rencana pembangunan laboratorium bahasa, dll. Maka pihak sekolah terlebih dahulu mengkonsultasikan masalah itu kepada komite sekolah agar dapat diberikan masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah . dan atas nama masyarakat yang diwakilinya, komite sekolah dapat menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap rencana program pendidikan yang disusun oleh sekolah.”²⁰

Selain daripada itu, posisi komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan masih berlanjut pada pemberian pada pemberian masukan dan pertimbangan dalam hal rancangan anggaran pendapatan dan belanja

¹⁸Kepmendiknas SK No. 004/U/2002, *tentang acuan pembentukan komite sekolah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 122

¹⁹Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 10 Oktober 2018.

²⁰Syafi'i, Waka Sarana Prasarana, evaluasi dan supervisi MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 11 Oktober 2018.

sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan, kriteria tenaga kependidikan, dan kriteria fasilitas pendidikan.²¹

Sebagaimana yang peneliti temukan dilapangan dari hasil wawancara dengan ketua komite MAN 1 Palembang yang menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang bahwa keterlibatan komite sekolah bersifat menyeluruh, mulai dari pemberian masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, pemeberi pertimbangan dalam melaksanakan proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk di pertimbangkan dan diperbantukan di sekolah. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Syafi'i.

“Dalam perannya sebagai badan yang memberikan pertimbangan atau nasihat, komite sekolah di MAN 1 Palmbang dalam fungsih perencanaan pendidikan memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) termasuk dalam rapat RAPBS. Dalam pengelolaan terhadap sumber daya pendidikan, antara lain :SDM, sarana dan prasarana, dan alokasi anggaran, komite sekolah berperan sebagai mengindentifikaasih berbagai pontensi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. Fungsih ini akan dapat berguna dalam memberikan pertimbangan mengenai sumber daya pendidikan yang dapat dipertimbangkan dan diperbantukan di sekolah.”²²

Hal senada diungkapkan juga oleh Bapak Ahmad Alamsyah, selaku waka human di MAN 1 Palembang, sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan program, yang menyangkut: kurikulum, silabus, PBM (Proses Belajar Mengajar), dan penilaian komite MAN 1 Palembang sebagai badan penasihat berperan penting dalam memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah, termasuk pembelajarannya.”²³

Berdasarkan pernyataan di atas bawasanya dalam meningkatkan mutu pendidikan komite sekolah ikut serta dalam keterlibatannya untuk menerapkan RAPBS dalam pengelollaan SDM, sarana prasarana, dan alokasih anggaran sekolah di MAN 1 Palembang.

b. Sebagai pendukung (*supporting agency*)

Peran komite sebagai badan pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan, dapat berupa dukungan finansila, tenaga, dan dukungan pikiran. Secaranyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan diantaranya dengan pemecahan masalah kekurangan guru, biaya sekolah bagi anak kurang mampu, dan tenaga untuk ikut memperbaiki sekolah yang rusak. Permberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada

²¹Departemen Agama RI. *Pedoman komite sekolah* (Direktorat jendral kelembagaan Agama Islam). 2003

²²Syafi'i, Waka Sarana Prasarana, evaluasi dan suvervisi MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 11 Oktober 2018.

²³Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 10 Oktober 2018.

masyarakat, hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan dewan pendidik.²⁴

Peran pendukung yang dipegang oleh komite sekolah tidak hanya sebatas memberikan dorongan dan motivasi saja, namun lebih dari itu. Dengan berperan sebagai supporting agency ini, Komite sekolah dapat mendorong dan menyadarkan para orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.²⁵ Karena pendidikan khususnya lembaga (satuan) pendidikan tidak dapat berperan sebagai mana fungsinya sebagai lembaga pembentuk generasi beradab dan berpengetahuan tanpa mendapat dukungan besar dari masyarakat luas.

Pada dasarnya pendidikan yang baik membutuhkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, ruangan kelas yang cukup, serta biaya yang banyak. Akan tetapi selama ini anggaran yang terdapat di sekolah sangat terbatas, oleh karenanya dalam hal ini masyarakat diharapkan menjadi penanggung jawab dan donatur yang memberikan dana demi kelancaran kegiatan pendidikan di sekolah. Masyarakat yang berminat dan bersympati dapat memberikan bantuannya melalui berbagai cara, misalnya: membantu penyediaan alat peraga, buku-buku, serta memberikan biaya kepada anak didik yang kurang mampu.²⁶

Komite sekolah sangat membantu kemandirian sekolah dalam hal anggaran, fasilitas sekolah yang masih kurang, mencari dana untuk menambah insentif guru, dengan mengajukan bantuan dana tanpa memberatkan orang tua siswa.²⁷ Selain fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam hal ini komite sekolah juga berperan dalam penggalangan dana dalam rangka pembiayaan pendidikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Ahmad Alamsyah, selaku waka humas di MAN 1 Palembang, sebagai berikut:²⁸

“Pendanaan yang didapatkan oleh komite sekolah dari hasil iuran orang tua siswa setiap bulannya, dan infaq, tetapi apabila ada orang tua siswa yang ekonominya kurang tidak di pungut iuran tersebut”

Dalam hal ini juga di sampaikan oleh ibu Nurbani selaku kepala TU di MAN 1 Palembang, membenarkan bahwa salah satu anggaran dana di dapat dari iuran orang tua siswa, dan infaq.

Komite sekolah juga membantu dalam hal sarana prasarana di MAN 1 Palembang. Dan tetapi tidak hanya memberikan dukungan dan pengadaan sarana prasarana fisik saja, namun termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia. Sebagai mana yang di ungkapkan oleh Ibu kepala TU MAN 1 Palembang, sebagai berikut:

“Selain membantu dalam sarana dan prasaran yang ada di sekolah, komite sekolah juga membantu mengembangkan sumber daya manusianya, yakni dengan memberikan sumbangan saran dan motivasi agar para guru senen tiasa dapat meningkatkan kinerjanya sehingga

²⁴Kepmendiknas SK No. 004/U/2002, *tentang acuan pembentukan komite sekolah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 122

²⁵Sri Rerani Pantjastuti, *Komite Sekolah*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), hlm 85

²⁶*Ibid*, hlm.85

²⁷*Ibid*, hlm 86

²⁸Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 10 Oktober 2018.

sekolah bisa menjadi lebih maju lada dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain.”²⁹

c. Sebagai pengontrol (*controlling agency*)

Peran komite sekolah selanjutnya adalah sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah. Pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah meliputi kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksana program di sekolah. Komite sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu output pendidikan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.³⁰

Berikut ini hasil wawancara dengan bapak Ahmad Alamsyah, selaku waka humas di MAN 1 Palembang, sebagai berikut: “Peran komite sekolah di MAN 1 Palembang ini dalam hal *controlling agency* yang bertindak sebagai pengawas atau pengontrol. Yaitu dalam hal keuangan dan jalannya proses belajar mengajar.”³¹

Hal senada diungkapkan juga oleh bapak Habson, selaku Ketua komite sekolah di MAN 1 Palembang, sebagai berikut:³² “Kalau masalah kontrol, saya setiap bulan mengontrol pengeluaran keuangan sekolah sekaligus transparansi penggunaan alokasi dana agar lebih dapat mempertanggung jawabkan. selain itu saja juga mengontrol proses jalannya belajar- mengajar peserta didik di MAN 1 Palembang.”

Begitu juga sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Syafi’i selaku waka sarana prasarana evaluasi dan supervisi, mengungkapkan bahwa peran dalam *controlling agency* komite sekolah tidak hanya terbatas pada finansial saja melainkan dalam urusan pengambilan keputusan dan pengembangan fasilitas. sebagai berikut:³³ “Komite sekolah berperan dalam pengontrol yaitu melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan di sekolah dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan program sekolah, maupun dalam pengembangan dan penambahan fasilitas sekolah, misalnya: buku-buku yang ada di perpustakaan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.”

Peran dalam *controlling* ini juga dimaksudkan agar komite sekolah sebagai patner sekolah dan masyarakat memberikan service yang memuaskan, terlebih yang berhubungan dengan input dan output yang dihasilkan sekolah harus dapat diterima oleh masyarakat sebagai pengguna.

d. Sebagai Mediator

Komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite sekolah untuk disampaikan kepada sekolah. Peran sebagai mediator ini

²⁹Nurbani, Kepala TU MAN 1 Palembang, wawancara, 11 oktober 2018.

³⁰Kepmendiknas SK No. 004/U/2002, *tentang acuan pembentukan komite sekolah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 122

³¹Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, Wawancara, 10 Oktober 2018.

³²Habson, Kepala Komite MAN 1 Palembang, Wawancara, 15 Oktober 2018.

³³Syafi’i, Waka Sarana Prasarana, evaluasi dan supervisi MAN 1 Palembang, Wawancara, 11 Oktober 2018.

memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan dan keluhan orang tua dan masyarakat.³⁴

Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Komite sekolah juga berperan dalam mengsosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah sehingga dapat akuntabel (dipertanggungjawabkan) kepada masyarakat. Bagi komite sekolah peran yang halus dijalankan sebagai mediator adalah pemberdayaan sumber daya yang ada pada orangtua siswa bagi pelaksanaan pendidikan sekolah.³⁵

Dalam oprasionalnya, komite sekolah sebagai mediator ini lebih banyak untuk ditunjukan dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat, menampung serta menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Kerjasama dengan masyarakat ini sangat mutlak untu dilakukan sebab sekolah adalah sebuah sistem yang berada di tngah-tengah masyarakat, hidup dan mati lembaga pendidikan tergantung dari peran serta masyarakat.³⁶

Begitu juga halnya, dalam setiap menjalankan programnya sekolah maupun komite sekolah senantiasa meminta bantuan kepada masyarakat, sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Habson selaku ketua komite sekolah yang mejelaskan terjalinnya hubungan yang harmonis antara pihak sekolah dengan masyarakat terutama dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan, berikut ini hasil wawancaranya:³⁷

“Selain dalam hal pengembangan fisik, komite sekolah berkerjasama dengan pihak sekolah dan masyarakat mengadakan kegiatan ke islaman, contohnya pada hari jumat pagi sebelumproses belajar mengajar di ajakan muhadoroh , dan ketika solat jumat yang laki-laki harus berjamaah solah di sekolah, agar anak-anak tesebut menjadi lebih baik dan berakhlak, ini juga tidak luput dari dukungan masyarakat luas khususnya para orang tau”

Komite sekolaah juga berperan menyerap dan menganalisis aspirasi ide, tntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat, baik masyarakat internal sekolah maupun eksternal sekolah. Bagi masyarakat internal sekolah (guru, karyawan, dan siswa) keberadaan komite sekolah dengan peran dan fungsinya sebgai mediator ini memberikan support bagi masyarakat internal sekolah itu sendiri, apalagi komite sekolah siap menampung segala keluh kesah yang dicurahkan untuk dibicarakan bersama jajaran pinpinan sekolah. Segaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Alamsyah selaku waka humas di MAN 1 Palembang, sebagai berikut:³⁸

“Keberadaan komite sekolah di MAN 1 Palembang ini banyak memberi manfaat, yang mana dengan adanya komite sekolah maka aspirasi siswa dan orang tua dapat tersalurkan dengan terwakilkan, selain

³⁴Kepmendiknas SK No. 004/U/2002, *tentang acuan pembentukan komite sekolah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 122

³⁵Kepmendiknas SK No. 004/U/2002, *tentang acuan pembentukan komite sekolah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 122

³⁶*Ibid.*,

³⁷Habson, Kepala Komite MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 15 Oktober 2018

³⁸Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 10 Oktober 2018.

itu pihak sekolah juga selalu mendapatkan support dari komite sekolah agar terus dapat meningkatkan mutu pendidikan.”

Sesuai dengan perannya sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat, komite sekolah berusaha untuk memberikan pengarahan dan keterangan yang jelas mengenai kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan hal ini berujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat bahwa pemerintah selalu melakukan upaya perbaikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa peran yang telah dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kepedulian komite sekolah terutama orang tua siswa untuk membantu, menunjang dan ikut serta demi kelancaran dan pengembangan Pendidikan.

KESIMPULAN

komite sekolah sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang karena komite sekolah memiliki beberapa peranan yang harus dijalankan untuk sekolah itu. Kesimpulan yang dapat di ambil dari peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang, adalah:

1. Peran komite sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang, sebagai berikut:
 - a. Memberikan pertimbangan (*advisory agency*), dalam setiap perencanaan dan program yang disusun oleh sekolah, misalnya dalam hal perbaikan dan pengadaan sarana prasarana, seperti perbaikan rang kelas, pengadaan alat peraga, pembangunan laboratorium, pembangunan ruang kelas. Selain itu, komite sekolah juga memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk dapat diperbantukan bagi pengembangan sekolah
 - b. Mendukung (*supporting agency*) penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran.
 - c. Melakukan Kontrol (*controlling agency*) terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber daya bagi pelaksanaan program di sekolah komite sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu pendidikan.
 - d. Menjadi Mediator atau penghubung antara aspirasi orang tua masyarakat terhadap pihak sekolah dan turut serta memasyarakatkan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang terkait dan berwenang di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Alamsyah, 2018, Waka Humas MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 10 Oktober.

- Danim Sudarwan, 2010, *pengantar pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Departemen Agama RI. 2003, *Pedoman komite sekolah* (Direktorat jendral kelembagaan Agama Islam).
- E.Mulyasa, 2006, *manajemen berbasis sekolah*, Bandung PT. Remaja Rosada Karya.
- Habson, Kepala Komite MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 15 Oktober 2018.
- Kepmendiknas, 2003, SK No. 004/U/2002, *tentang acuan pembentukan komite sekolah* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Nurbani, 2018, Kepala TU MAN 1 Palembang, *wawancara*, 11 oktober.
- Rahmayulis, 1995, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta Pusat: Kalam Mulia.
- Sri Rerani Pantjastuti, 2008, *komite sekolah*, Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Sugiyono, 2016, *metodelogi penelitian kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Sukirno, 2006, *pedoman kerja komite sekolah*, yogyakarta: Pustaka widyamata.
- Syafi'i, 2018, Waka Sarana Prasarana, evaluasi dan suvervisi MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 11 Oktober.
- U.H. Saidah, 2016, *pengantar pendidikan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-undang dan peraturan pemerintah RI, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, (jakarta: dirjen pendidikan islam depag RI, 2006)